
**DAMPAK IMPLEMENTASI STANDAR WAJIB MELALUI PERDAGANGAN
PRODUK, UNSUR PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA**
*The Impact of Mandatory Standar Implementation trough Products Trade, Consumer
Protection Elements and Bussinessmen*

Endi Hari Purwanto dan Febrian Isharyadi

Puslitbang Badan Standardisasi Nasional
Gedung BPPT I Lantai 13, Jl. M. H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat, 10340, DKI Jakarta, Indonesia
E-mail: endi@bsn.go.id

Diterima: 28 April 2016, Direvisi: 18 Juli 2016, Disetujui: 21 Juli 2016

Abstrak

Perdagangan bebas memengaruhi nilai ekspor impor Indonesia karena menjadi negara berjumlah penduduk besar yang berpotensi bagi penjualan barang-barang impor. SNI wajib telah diberlakukan oleh regulator sebanyak 267 standar tetapi banyak produk impor yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Asumsinya, regulasi teknis berdampak positif pada perdagangan Indonesia sehingga meningkatkan produksi dalam negeri. Diharapkan pelaku usaha mampu memproduksi produk dengan memperhatikan keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat serta fungsi lingkungan hidup. Tujuan penelitian adalah menganalisis dampak implementasi SNI wajib oleh industri dari sudut pandang perdagangan produk, unsur perlindungan konsumen dan pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk perdagangan produk menggunakan metode wawancara langsung pada industri sehingga diperoleh dampak sementara dan kontinyu. Pada unsur perlindungan konsumen menggunakan analisis data uji petik produk ber-SNI di pasar dan untuk pelaku usaha menggunakan metode wawancara terhadap industri untuk menganalisis dampak dari 3 variabel yaitu: volume penjualan, jumlah pengaduan dan biaya produksi dengan 3 parameter yaitu meningkat, menurun dan tetap. Hasilnya memperlihatkan pemberlakuan SNI secara wajib bagi industri, sebagian memberikan dampak positif dan negatif, tergantung produk yang diimplementasi. Namun, secara umum disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah untuk menerapkan SNI melalui regulasi memberikan dampak meningkatkan volume penjualan produk bagi perusahaan (76 % dari 17 produk yang dijadikan sampel), menurunkan jumlah pengaduan produk cacat di pasar (53 %) dan meningkatkan biaya operasional perusahaan (71 %). Peningkatan biaya ini disebabkan adanya beban biaya sertifikasi produk yang meliputi: biaya penyediaan sampel dan biaya pengujian.

Kata kunci: SNI, perdagangan produk, unsur perlindungan konsumen, pelaku usaha, SNI wajib.

Abstract

The Free trade was affected the exports imports value of Indonesia for being a large population numbered country had been potential for imported goods sale. There had been mandatory SNI by regulator as much 267 standard, but many imported products doesn't comply with the standard. This assumption, technical regulations have positive impact on Indonesia trade to increase domestic production. The expected of businessmen can produce the product with attention to security, safety and public health along environmental functions. The purpose of this study was analyzing the impact of compulsory SNI implementation by industry from viewpoint of trade products, cosumer protection elements and businessmen. This research used qualitative method, for products trade used interviews direct method with industry that obtainable the impact of transient and continuous. The cosumer protection elements used analysis of pick test data for SNI products on market and for businessmen used interviews methods for industry to analyze the impact on three variables i.e. sales volume, number of complaints and cost of production with 3 parameters i.e. increased, decreased and fixed. The results showed application of compulsory SNI for industries had a positive and negative impact partly depend on product implemented. However, general concluded that government policys for apply SNI through regulatory give impact to increased sales volume of product for company (76 % from 17 products where used a sample), decreased complaints number from product defects at market (53 %) and rising company operational costs (71 %). This increasing costs caused by products certification costs which cover sample providing cost and testing costs.

Keywords: SNI, trade of good, cosumer protection elements, businessmen, compulsory of SNI.

1. PENDAHULUAN

Perdagangan dunia yang semakin tanpa batas antar negara menjadikan kebutuhan suatu negara dapat dengan mudah dan lebih murah diperoleh dari pasar luar negeri (importasi barang). Jika demikian produk murah (lebih ekonomis) akan mudah disukai oleh masyarakat dibandingkan produk dalam negeri sehingga terpenuhinya kebutuhan masyarakat lebih ekonomis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, perdagangan bebas mendorong pergerakan barang dan produk yang dikenal dengan istilah neraca perdagangan. Neraca perdagangan yang semakin surplus memperlihatkan bahwa negara tersebut memiliki daya saing komoditi perdagangan yang lebih baik terhadap negara lain. Indikator daya saing meningkat adalah nilai ekspor yang cukup tinggi dibandingkan nilai impor. Nilai perdagangan yang selalu surplus akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik.

Proses dinamika produk dan barang dalam konteks arus perdagangan barang antar negara melibatkan sejumlah peraturan dan regulasi yang mengatur hal tersebut. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan rujukan bagi seluruh negara di dunia dalam pengaturan perdagangan produk, barang dan komoditi. Bahasa perdagangan internasional, selain uang sebagai alat transaksi adalah standar. Artinya, standar diposisikan seperti sebuah aturan atau norma yang disepakati antar pihak-pihak yang melakukan perdagangan. Standar dibuat dengan mengacu kepada pertimbangan kualitas, keselamatan, keamanan dan keselamatan yang diakui bersama dari suatu produk yang akan dijual berdasarkan pada azas-azas ilmiah (Setiadi, 2011). Standar tersebut kemudian digunakan sebagai persyaratan teknis yang harus dipenuhi sebelum melakukan perdagangan yang diatur dalam suatu regulasi (peraturan).

Hipotesisnya adalah regulasi teknis diharapkan berdampak positif terhadap perdagangan Indonesia sehingga dapat meningkatkan produksi dalam negeri. Disamping itu, akan berdampak positif bagi pelaku usaha dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pemberlakuan regulasi teknis berbasis SNI salah satunya dilakukan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen dengan produk yang berkualitas aman. Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai penanggungjawab pengembangan

standardisasi, telah menetapkan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) No. 301 mengenai mengenai Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib. Pedoman ini menyebutkan bahwa pemerintah harus melakukan analisis manfaat dan resiko sebelum menetapkan regulasi teknis berbasis SNI agar tidak berakibat negatif, seperti mematikan industri dalam negeri, diskriminasi, dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa penerapan standar wajib tidak 100 persen terlaksana secara murni. Dampak yang diharapkan dari diberlakukannya standar secara wajib tidak tercapai sepenuhnya sesuai harapan. Pemberlakuan wajib suatu standar merupakan upaya pemerintah untuk menerapkan kepentingan perdagangannya dalam hal *safe guard* dan K3L (keamanan, keselamatan, kesehatan dan fungsi lingkungan hidup). Namun, tujuan ini nampaknya perlu diukur dengan melakukan penelitian dampak penerapan SNI wajib pasca diberlakukannya standar tersebut. Dampak yang dimaksud dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 jenis yaitu dampak terhadap perdagangan, dampak terhadap masyarakat, pencapaian unsur perlindungan konsumen (K3L), dan dampak terhadap para pelaku usaha. Penelitian ini secara umum bertujuan menganalisis dampak yang muncul akibat diterapkannya SNI wajib, dengan tujuan spesifiknya yaitu menganalisis dampak penerapan SNI wajib terhadap perdagangan produk, menganalisis dampak penerapan SNI wajib terhadap aspek perlindungan konsumen, dan menganalisis dampak penerapan SNI wajib terhadap pelaku usaha.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Korelasi Penerapan Standar terhadap Perdagangan

Standardisasi sudah menjadi isu penting bagi pengembangan dan peningkatan perdagangan. Standar yang diterapkan oleh pelaku usaha merupakan prasyarat bagi produk untuk masuk ke pangsa pasar tertentu. Pemenuhan prasyarat produk tersebut menjadikannya mempunyai pasar sehingga menimbulkan nilai produk yang dapat dikuantifikasikan dalam nilai mata uang. Hal ini memperlihatkan bahwa standar menjadi syarat mutlak masuk pasar. Lain halnya, jika produk dan pasar sudah sama-sama menggunakan standar, maka produk dapat tetap mempertahankan pangsa pasarnya walaupun pesaing tumbuh dan berkembang cukup banyak. Kondisi ini memaksa produsen melakukan tindakan inovasi yang mampu membuka

segmentasi baru konsumen. Tindakan ini merupakan inovasi dengan berbasis pada standar. Standar dan inovasi harus berkolaborasi secara maksimal untuk dapat tetap mempertahankan pangsa pasar suatu produk. Dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Standar hanya sebagai elemen basis awal yang pengembangan berikutnya diperlukan inovasi dalam peningkatan pangsa pasarnya.

Dapat dikatakan secara umum bahwa standar merupakan produk dari suatu kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Suatu kegiatan litbang pun dapat menghasilkan suatu produk inovatif. Produk inovatif apabila telah diakui secara nasional dapat disusun menjadi suatu standar. Standar dan inovasi dapat menciptakan pangsa pasar baru, artinya dapat membuat produk memiliki konsumen baru (pasar yang lebih luas). Pasar yang lebih luas dapat meningkatkan arus perdagangan yang cukup tinggi terhadap suatu produk. Apabila dihubungkan antara standar dengan perdagangan maka kata kuncinya adalah penciptaan pangsa pasar baru. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pangsa pasar baru merupakan indikator adanya peningkatan daya saing.

Penerapan standar yang ditopang dengan regulasi Pemerintah secara hakiki untuk melindungi masyarakat dari segi keamanan, keselamatan dan kesehatan. Namun, pada prakteknya berfungsi pula sebagai faktor yang mampu menghambat arus impor produk ke dalam suatu negara. Hal ini sangat bergantung pada kualitas standar yang diberlakukan, yang meliputi tingkat harmonisasi dan konten *national difference*. Paling tidak, ada 3 fenomena hubungan antara penerapan standar berbasis regulasi terhadap dampak perdagangan ekspor/impor apabila suatu regulasi berbasis standar diberlakukan, yaitu:

1. Penerapan standar nasional dan regulasi di negara A akan memiliki dampak signifikan terhadap penurunan impor produk ke negara A (Negative Impact /fungsi hambatan) (Chen, 2006 dan Sanchez, 2008). Hal ini terjadi apabila standar nasional tersebut memiliki unsur kekhasan nasional yang unik (*national differences*) yang tidak dimiliki negara lain sehingga mempersulit negara lain melakukan ekspor ke negara tersebut.
2. Penerapan standar nasional dan regulasi yang harmonis terhadap standar internasional di negara A memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan impor produk ke negara A (Positive Impact) (Baller, 2007, Chen & Mattoo, 2004, dan Michalek, 2005). Hal ini terjadi apabila standar nasional telah

harmonis dengan standar internasional tanpa sedikit pun melakukan *national differences*.

3. Penerapan standar nasional dan regulasi yang harmonis terhadap standar internasional di negara A memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekspor dari negara A (Positive Impact). Kasus ini khusus untuk produk-produk dengan pasar Uni Eropa (Baller, 2007). Hal ini terjadi apabila standar nasional sudah harmonis dengan standar internasional namun daya saing harga produk dalam negeri mengungguli pasar regional bahkan internasional.

Pada penerapan standar dan daya saing produk yang dihasilkan terdapat hubungan yang kuat. Namun, kedua faktor tersebut tidak mempunyai hubungan secara langsung. Peningkatan daya saing produk dalam suatu negara ditentukan oleh kemampuan produk dalam negerinya untuk bersaing di pasar regional dan global. Apabila suatu perusahaan produk memproduksi produknya berbasis standar yang telah sesuai dengan standar produk yang diminta di pasar regional atau internasional maka dapat dikatakan produsen tersebut siap memiliki daya saing dari sisi prasyarat standar. Tetapi, faktor ini dipengaruhi faktor lainnya seperti iklim usaha, nilai tukar rupiah, suku bunga bank Indonesia, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Standar pun memiliki peran sebagai instrumen perlindungan konsumen dari produk yang tidak aman dan sehat, dengan manfaat samping peningkatan daya saing produk apabila iklim usaha diasumsikan stabil positif. Artinya, peningkatan daya saing melalui penerapan standar harus didukung oleh Pemerintah melalui kebijakan fiskal, nilai tukar rupiah, suku bunga bank Indonesia, kebijakan inflasi dan stabilitas pertumbuhan ekonomi. Standar merupakan salah satu prasyarat dari peningkatan daya saing. Standar sebagai syarat untuk dapat masuk ke pasar baru, namun disayangkan, banyak negara yang telah mencapai pembangunan dan pengembangan standardisasi yang baik, tetap menggunakan parameter daya saing lainnya untuk memenangkan perang perdagangannya dengan harga. Berbeda dengan Pemerintah Vietnam, yang lebih memberikan kemudahan terhadap pengusaha asing dibandingkan pengusaha lokal. Rantai birokrasi dibuat dengan simple bagi penanam modal investasi asing. Pemerintah Vietnam melakukan *The Enterprise Law* yang bertujuan mengurangi proses pengusaha untuk mendaftarkan usahanya dari 13 langkah menjadi 7 langkah (mempersingkat waktu, dari 99 hari untuk mengurus izin usaha menjadi 17 hari). Upaya ini mampu menurunkan biaya

pengurusan perijinan dari US\$ 660 menjadi US\$ 30 (Christensen & Goedhuys, 2004).

2.2 Korelasi Penerapan Standar terhadap Unsur Perlindungan Konsumen

Penerapan standar dan regulasi memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat serta lingkungan (K3L). Misi standar saat diterbitkan adalah harus mengandung unsur-unsur melindungi konsumen atau masyarakat dari bahaya dan resiko K3L terutama ketika diadopsi sebagai bagian dari regulasi teknis. Contohnya pemberlakuan secara wajib penggunaan helm SNI di tahun 2008 melalui Permen Perindustrian RI No.40/M-IND/PER/4/2009 yang memberikan penurunan tingkat cedera kepala berat (severe HI) sebesar 100%. Apabila ditinjau lebih detail, cedera kepala yang dialami dari penggunaan helm sepeda motor ber-SNI, memberikan implikasi perlindungan pada masyarakat terhadap cedera fraktur tengkorak dan tulang wajah sebesar 8,67 % selama 3 tahun setelah pemberlakuan dibandingkan dengan 3 tahun sebelum pemberlakuan regulasi wajib. Hal ini merupakan contoh bahwa konten tekstual standar sejalan (ekuivalen) terhadap dampak kontekstualnya. (Purwanto, 2013). Masalahnya, hubungan tersebut tidak dapat ekuivalen (antara parameter kualitas standar dengan dampak nyata di lapangan) karena jaminan suatu standar (SNI) terhadap tingkat keamanan dan keselamatan secara nyata dapat dibuktikan melalui fakta empirik seperti penurunan resiko dari bahaya tidak aman, tidak selamat dan tidak sehat. Skala batasan aman yang terkandung dalam parameter persyaratan merupakan fakta ilmiah tekstual, karena itu suatu parameter K3L dalam SNI yang bersifat tekstual jika ditransformasi dalam bentuk kontekstual maka hasilnya terkadang tidak semuanya dapat dibuktikan secara empirik.

Asumsinya, apabila regulasi wajib telah diberlakukan maka secara resmi tidak ada produk yang beredar di pasar yang tidak memenuhi persyaratan SNI yang tercantum dalam regulasi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, metode uji untuk merefleksikan kondisi penerapan standar di lapangan menggunakan uji petik dan persyaratan standar yang tidak dapat dipenuhi diasumsikan sebagai potensi munculnya kejadian berbahaya.

2.3 Korelasi Penerapan Standar Terhadap Pelaku Usaha

Banyak penelitian membuktikan bahwa penerapan standar dan regulasi memberikan dampak positif bagi pelaku usaha. ISO telah

mengeluarkan suatu metode untuk menghitung manfaat dari menerapkan suatu standar dalam perusahaan. Metode tersebut belum memasukan biaya sebagai unsur kuantifikasi manfaat, namun memberikan sejumlah parameter yang dapat menelusuri penerapan standar pada perusahaan untuk dihitung sebagai manfaat dari penerapan tersebut. Parameter yang dikuantifikasi meliputi pelayanan (service), pemasaran & penjualan, outbound logistik, produksi, dan inbound logistik (Gerundino & Hilb, 2010). Berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 parameter yang merepresentasikan manfaat dari penerapan standar yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu volume penjualan, biaya produksi dan jumlah pengaduan produk oleh masyarakat.

Volume penjualan produk dapat digunakan sebagai parameter untuk menggambarkan produktivitas suatu industri manufaktur. Volume penjualan merupakan indikator adanya perubahan tingkat efisiensi (produktivitas) yang terjadi dalam sebuah proses produksi sebagai akibat penerapan standar, penerapan Total Quality Management (TQM/penerapan *just in time*). Bahkan dapat dikatakan bahwa adanya market baru sebagai akibat industri yang mampu memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Fakta yang ada memperlihatkan bahwa peningkatan volume penjualan sebagai akibat diterapkannya suatu standar hanya berlangsung selama 2-3 tahun penerapan awal. Standar dalam hal ini berfungsi sebagai alat pembuka pasar (penetrasi) yang pada persaingan selanjutnya akan sangat dipengaruhi oleh sejumlah elemen lain yang mendukung peningkatan volume penjualan, diantaranya biaya bahan baku yang murah, biaya upah pekerja yang murah dan rendahnya biaya birokrasi yang berdampak pada tingkat harga produk yang dihasilkan. Kondisi tersebut mendorong pelaku usaha melakukan efisiensi bahan baku yang digunakan (kualitas sedang), efisiensi mesin (penurunan kapasitas), efisiensi karyawan (penurunan *man-hour*) dan pada akhirnya pelaku usaha menurunkan total produksinya sehingga menurunkan daya saing produk nasional yang berkompetisi di pasar regional dan internasional. Peran pemerintah dalam memberikan insentif bagi para pelaku usaha lokal sangat dibutuhkan.

Proses produksi dari industri yang dilakukan secara konvensional beralih menjadi produksi massal dengan basis teknologi dan standar dikatakan mengalami peningkatan nilai barang akibat penurunan biaya produksi (terjadi efisiensi proses dan reduksi). Penerapan standar secara teori memberikan kenaikan biaya operasional pelaku usaha karena biaya

sertifikasi yang dipersyaratkan meliputi biaya asesmen, asesor, pengadaan sampel uji, biaya pengujian, biaya inspeksi, biaya penundaan di pelabuhan dan sebagainya. Hal ini umumnya terjadi pada industri kecil dan menengah dengan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) positif dalam 3 tahun terakhir. EBIT yang positif menunjukkan bahwa produsen mampu meraih keuntungan meskipun dikurangi biaya operasional seperti biaya iklan, biaya pemasaran, administrasi dan biaya sertifikasi.

Penerapan standar secara konsep akan menurunkan level produk *reject* (tidak sesuai permintaan pasar) selama standar yang digunakan tidak mengundang kontroversial. Keberterimaan produk berstandar akan lebih tinggi dibandingkan yang tidak sehingga akan menurunkan jumlah pengaduan produk oleh konsumen. Hal ini merupakan konskuensi dari jaminan mutu suatu produk berstandar. Penelitian mengenai penerapan standar membuktikan bahwa penerapan standar militer 414 dalam menurunkan jumlah produk udang yang tidak sesuai dengan standar berat perusahaan terbukti dapat menurunkan jumlah produk yang tidak sesuai standar berat perusahaan sebesar 32 persen sehingga menurunkan biaya kegagalan internal. Hal ini mengakibatkan biaya mutu yang dikeluarkan oleh perusahaan mengalami penurunan dari Rp.1.377.624 per bulan menjadi Rp. 1.345.173 per bulan (penurunan 3,47%) (Ratnawati, 2004).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki 3 tujuan yaitu menganalisis dampak penerapan SNI dari sisi perdagangan produk, unsur perlindungan konsumen (K3L), dan pelaku usaha.

3.1 Metode Analisis Data

Tujuan pertama penelitian diperoleh dengan menggunakan parameter pertumbuhan ekspor, dan penurunan/peningkatan impor produk dari komoditi yang memiliki pemberlakuan SNI wajib. Komoditi yang dianalisis dalam penelitian ini dibatasi pada 17 produk. Produk tersebut dipilih dari data pada tahun 2010-2013 yang telah diranking dan memiliki jumlah NRP (Nomor Registrasi Produk) serta SPB (Surat Pendaftaran Barang) terbanyak. Pembatasan data dari tahun 2010-2013 dilakukan karena ketersediaan data hanya sampai kurun waktu tersebut dan rentang waktu 1-3 tahun dipandang cukup untuk dapat memotret dampak pemberlakuan SNI wajib dari komoditi tersebut. Parameter nilai ekspor dianalisis dengan metode rasio antara ekspor

terhadap impor (ISP). Parameter penurunan/peningkatan impor dilakukan dengan pendekatan menghitung rasio antara impor terhadap ekspor dari komoditi tersebut. Kedua parameter tersebut pun digunakan dalam analisis daya saing komoditi dalam negeri terhadap negara importir.

Tujuan kedua penelitian ini dicapai menggunakan 3 parameter yaitu peningkatan angka keselamatan masyarakat dari penggunaan produk, peningkatan *level* keamanan dari penggunaan suatu produk ber-SNI, dan peningkatan *level* kesehatan masyarakat. Peningkatan angka keselamatan masyarakat dari penggunaan produk contohnya penurunan angka cedera kepala karena penggunaan helm ber-SNI dan penurunan angka kejadian kebakaran karena penggunaan instalasi listrik ber-SNI. Peningkatan *level* keamanan dari penggunaan suatu produk ber-SNI contohnya terjadi penurunan angka tabung gas LPG meledak, Peningkatan *level* kesehatan masyarakat contohnya menurunnya angka penderita gondok karena penggunaan garam beryodium ber-SNI. Pengukuran terhadap parameter tersebut dilakukan melalui analisis data sekunder dan primer. Data sekunder yang digunakan merupakan data hasil *desk study* dan hasil survei penerapan SNI yang telah dilakukan oleh Pusat Sistem Penerapan Standardisasi (PSPS) BSN. Data primer yang digunakan merupakan hasil uji petik pada 5 jenis produk SNI wajib dengan asumsi produk yang lulus hasil uji petik telah memenuhi K3L dan yang tidak lulus berpotensi menimbulkan resiko K3L.

Tujuan ketiga ini dicapai dengan menggunakan parameter volume penjualan yang meningkat pasca pemberlakuan SNI wajib, penurunan biaya operasional, dan menurunnya angka pengaduan produk. Parameter ini dijadikan indikator penerapan SNI oleh pelaku usaha yang diasumsikan mampu merealisasikan 3 parameter tersebut. Asumsinya, korelasi dari parameter ini tidak sepenuhnya kuat, namun arahnya diduga positif kecuali untuk beberapa kasus tertentu. Rangkuman metode analisis data tersaji dalam Tabel 1.

3.2 Waktu dan Data Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2014 dan berskala nasional dengan lokasi penelitian di beberapa kota di Indonesia. Keterangan mengenai data penelitian yang digunakan tersaji dalam Tabel 2.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sampel yang pilih dengan metode purposive sampling, yaitu sampel diambil dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan penelitian serta memperhatikan ketersediaan dan kapabilitas data yang ada untuk dapat diolah. Populasi produk SNI wajib hingga akhir 2013 berjumlah 117 produk, yang diambil menjadi sampel 17

produk. Pertimbangannya bahwa dalam 5 tahun terakhir (2010-2014) permintaan sertifikasi produk dalam negeri (NRP) dan sertifikasi produk impor (SPB) untuk produk tersebut cukup besar (PPMB, 2014). Analisis K3L menggunakan sampel 5 jenis produk dari data hasil uji petik PSPS BSN. Penjelasan tersaji dalam Tabel 3. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer.

Tabel 1 Metode analisis data.

No	Sasaran/ Ruang Lingkup	Parameter Implikasi	Metode Analisis	Rumus	Syarat Dampak
1	Perdagangan/ (nasional)	Penurunan Impor (+)	Selisih Impor Sebelum & Sesudah	$PI = \overline{Impor}_{sebelum} - \overline{Impor}_{sesudah}$	1. Jika PI = (+) maka Dampak (+) 2. Jika PI = (-) maka Dampak (-)
		Peningkatan Daya Saing (+)	Selisih ISP Sebelum & Sesudah	$ISP_t = \frac{(Ekspor - Impor)}{Ekspor + Impor}$ $PDS = \overline{ISP}_{sesudah} - \overline{ISP}_{sebelum}$	3. Jika PDS = (+) maka Dampak (+) 4. Jika PDS = (-) maka Dampak (-)
		Penurunan pertumbuhan impor (+)	Rata-Rata Pertumbuhan Impor	$\overline{PPI} = \frac{(X_2 - X_1) + (X_3 - X_2) + \dots + (X_n - X_{n-1})}{n-1}$	5. Jika PPI = (-) maka Dampak (+) 6. Jika PPI = (+) maka Dampak (-)
		Peningkatan rata-rata daya saing (+)	Rata-Rata Daya Saing	$\overline{ISP} = \frac{\sum_{2010}^{2014} ISP}{5}$	7. Jika PRDS = (+) maka Dampak (+) 8. Jika PRDS = (-) maka Dampak (-)
2	K3L/ (sampel kota, purposive)	Persen Kesesuaian Uji Petik	Jumlah gagal uji sampel kota (%)	$\% \text{ gagal}_{\text{produk}} = \frac{\text{jumlah sampel gagal}}{\text{jumlah sampel kota}}$ $\% \text{ Dampak}_{(5 \text{ produk})} = \frac{\text{jumlah produk gagal}}{5 \text{ produk}}$	9. Jika % Dampak = 0 % maka tidak terdapat potensi resiko K3L 10. Jika % Dampak > 0 % maka terdapat potensi resiko K3L
3	Pelaku usaha/ (sampel industri, purposive)	Peningkatan volume penjualan (+)	1. Meningkat 2. Menurun 3. Tetap/konstan	$\% \text{ vol. penjualan meningkat} = \frac{\text{jumlah pelaku dgn vol. penjualan } \blacktriangle}{\text{Total sampel pelaku usaha}}$ $\% \text{ vol. penjualan menurun} = \frac{\text{jumlah pelaku usaha dgn vol. penjualan } \blacktriangledown}{\text{Total sampel pelaku usaha}}$ $\% \text{ vol. penjualan tetap} = \frac{\text{jumlah pelaku usaha dgn vol. penjualan} -}{\text{Total sampel pelaku usaha}}$	Dampak diambil dari % vol. penjualan yang terbesar
		Penurunan jumlah pengaduan (+)	4. Meningkat 5. Menurun 6. Tetap / konstan	$\% \text{ pengaduan meningkat} = \frac{\text{jumlah pelaku dgn jml pengaduan } \blacktriangle}{\text{Total sampel pelaku usaha}}$ $\% \text{ pengaduan menurun} = \frac{\text{jumlah pelaku usaha dgn jml pengaduan } \blacktriangledown}{\text{Total sampel pelaku usaha}}$ $\% \text{ pengaduan tetap} = \frac{\text{jumlah pelaku usaha dgn jml pengaduan tetap} -}{\text{Total sampel pelaku usaha}}$	Dampak diambil dari % jumlah pengaduan yang terbesar
		Penurunan biaya produksi/operasional (+)	7. Meningkat 8. Menurun 9. Tetap / konstan	$\% \text{ biaya produksi meningkat} = \frac{\text{jumlah pelaku dgn biaya produksi } \blacktriangle}{\text{Total sampel pelaku usaha}}$ $\% \text{ biaya produksi menurun} = \frac{\text{jumlah pelaku usaha dgn biaya produksi } \blacktriangledown}{\text{Total sampel pelaku usaha}}$ $\% \text{ biaya produksi tetap} = \frac{\text{jumlah pelaku usaha dgn biaya produksi} -}{\text{Total sampel pelaku usaha}}$	Dampak diambil dari % biaya produksi yang terbesar

sumber: Hasil pengolahan peneliti (2014).

Tabel 2 Waktu dan data penelitian.

No	Sasaran/ Ruang Lingkup	Parameter	Objek Sampel Analisis	Tahun Data
1	Perdagangan/ (nasional)	Penurunan impor	17 produk ¹⁾	1-3 tahun sebelum–sesudah ²⁾
		Peningkatan daya saing	17 produk	1-3 tahun sebelum–sesudah
		Penurunan pertumbuhan impor	17 produk	Tahun pasca regulasi–2014
		Peningkatan rata-rata daya saing	17 produk	2010-2014
2	K3L/ (sampel kota, <i>purposive</i>)	Pelaksanaan uji petik	▪ 22 lampu swaballast (11 kota)	2012
			▪ 13 ban sepeda motor (13 kota)	2012
			▪ 7 sampel pupuk (7 kota)	2010-2011
			▪ 22 tusuk kontak (11 kota)	2011
			▪ 21 kotak kontak (12 kota)	2012
			▪ 10 tusuk kontak cabang 3 (10 kota)	2010
			▪ 12 sakelar (12 kota)	
3	Pelaku usaha/(sampel industri, <i>purposive</i>)	Volume penjualan	84 industri	2014
		Jumlah pengaduan	84 industri	2014
		Biaya roduksi/operasional	84 industri	2014

sumber: Hasil pengolahan data peneliti (2014).

Keterangan:

1. Terdiri dari lampu swaballast, ban kendaraan bermotor, tepung terigu, pupuk, tabung LPG, kabel listrik, kipas angin, baja lembaran, regulator LPG, pelek, tusuk kontak-kotak kontak, baja tulangan beton, sakelar, kompor LPG, ubin keramik, keramik tableware dan kaca lembaran.
2. Sebelum dan sesudah pemberlakuan regulasi SNI wajib saat pertama kali berdasar Peraturan Menteri.

Tabel 3 Populasi dan sampel.

No	Sasaran / Ruang Lingkup	Parameter Implikasi	Skala Data	Sampel Produk SNI Wajib	Sampel Analisis
1	Perdagangan/ (nasional)	Penurunan Impor (+)	Nasional	117 produk	17 produk ¹⁾
		Peningkatan daya saing (+)			
		Penurunan pertumbuhan impor (+)			
		Peningkatan rata-rata daya saing (+)			
2	K3L/ (sampel kota, <i>purposive</i>)	Persen Kesesuaian Uji Petik	Sampel kota	117 produk	Lima (5) produk:
					▪ Lampu swaballast (22 kota)
					▪ Ban sepeda motor (13 kota)
					▪ Pupuk (7 kota)
					▪ Tusuk kontak (21 kota)
					▪ Kotak kontak (21 kota)
					▪ Saklar (12 kota)
3	Pelaku usaha/(sampel industri, <i>purposive</i>)	Peningkatan volume penjualan (+)	Sampel 84 industri	117 produk	17 produk ¹⁾
		Penurunan jumlah pengaduan (+)			
		Penurunan biaya produksi/ operasional (+)			

sumber: Hasil pengolahan peneliti (2014).

Data sekunder meliputi data ekspor dan impor dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data dari PSPS BSN sedangkan data primer meliputi data dari survei industri dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku usaha (produsen) dari 17 produk yang dianalisis. Data sekunder dilakukan dengan cara pencarian dan penelusuran melalui website dan pembelian data BPS khususnya data produksi. Data uji petik diperoleh dari PSPS yang memberikan izin sebagai pemiliki hasil uji petik yang dianalisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Dampak terhadap Perdagangan

Hasil perhitungan secara umum terhadap nilai impor dan daya saing (ISP) 17 sampel produk SNI wajib yang meliputi lampu swaballast (SNI 04-6504-2001), ban kendaraan bermotor, tepung terigu (SNI 3751:2009), pupuk, tabung LPG (SNI 1452:2011), kabel Listrik, kipas angin (SNI 04-6292.1-2003), baja lembaran (SNI 07-0601-2006), regulator LPG (SNI 7369:2008), tusuk kontak-kotak kontak (SNI 04-3892.1-2006), baja tulangan beton (SNI 07-0954-2005), saklar (SNI 04-6203.1-2006), kompor gas LPG (SNI 7368:2007), ubin keramik (ISO 13006:2008), keramik tableware (SNI 7275:2008) dan kaca lembaran (SNI 15-0047-2005) menunjukkan bahwa penerapan SNI wajib memberikan pengaruh negatif (-) pada hampir 50 % produk yang dijadikan sampel penelitian. Pengaruh ini bersifat sebagai dampak sementara (*temporary effect*) artinya pada saat awal pemberlakuan SNI wajib secara umum memperlihatkan dampak yang negatif (-) dan positif (+) dengan berimbang.

Hal ini ditunjukkan oleh kinerja impor 8 produk SNI wajib yang cenderung berdampak positif (+) pada kurun waktu 1-3 tahun pasca pemberlakuan. Produk tersebut meliputi lampu swaballast, ban kendaraan bermotor, tabung LPG, baja lembaran, pelek, kompor gas LPG, ubin keramik, dan keramik tableware. Produk yang cenderung berdampak negatif (-) nilai impornya terjadi pada 8 produk lainnya yaitu: tepung terigu, pupuk, kabel listrik, regulator LPG, tusuk kontak-kotak kontak, baja tulangan beton, saklar, dan kaca lembaran. Ini memberikan pemahaman bahwa pemberlakuan SNI wajib dengan kondisi sampel produk acak memperlihatkan variasi implikasi yang berbeda. Jenis produk yang berbeda akan memberikan dampak yang berbeda karena saat diterapkan menjadi SNI wajib memiliki instrumen kebijakan pemerintah yang berbeda sehingga efeknya berbeda pula.

Berdasarkan hasil rangkuman pengolahan data memberikan gambaran bahwa pemberlakuan penerapan SNI wajib sebagian memberikan pengaruh bagi penurunan nilai impor (+) dan sebagian terbukti memberikan pengaruh adanya peningkatan nilai impor (-). Hal ini diduga karena karakteristik kebijakan dari masing-masing produk tersebut berbeda sehingga memberikan pengaruh terhadap impor yang berbeda, adanya faktor lain yang mempunyai pengaruh dominan terhadap nilai impor selain penerapan SNI, dan adanya penerapan SNI yang tidak memiliki korelasi langsung dengan nilai impor tetapi merupakan efek domino (*chain effect*) dari kebijakan penerapan SNI.

Berbeda apabila ditinjau dari sudut pandang secara berkelanjutan (*continue effect*). Dampak berkelanjutan adalah dampak yang muncul sebagai akibat penerapan SNI wajib yang diukur sejak pasca pemberlakuan sampai dengan tahun saat penelitian ini berlangsung (2014). Terdapat 8 produk dari 17 sampel yang memiliki dampak penurunan nilai impor yang konsisten positif (+) hingga akhir 2014. Delapan produk tersebut meliputi lampu swaballast, ban kendaraan bermotor, pupuk, kabel listrik, regulator LPG, pelek kendaraan, saklar dan kaca lembaran. Hal ini berarti bahwa pemberlakuan SNI secara wajib hanya mampu memberikan dampak penurunan nilai impor secara *temporary* (sebelum-sesudah) dan *continue* (berkelanjutan/berdampak positif) pada 8 produk tersebut.

Disimpulkan secara umum bahwa dari 17 sampel produk yang dianalisis diperoleh hasil 4 produk SNI wajib (29,4 %) yang memiliki dampak positif (penurunan nilai impor) secara konsisten dengan produknya yaitu pupuk, kabel listrik, regulator LPG dan sakelar.

Reaksi positif yang dihasilkan dari penerapan SNI wajib pupuk dikarenakan banyak faktor seperti bahan baku pupuk di Indonesia cukup melimpah, pemerintah memberikan perlindungan kepada pelaku usaha pupuk anorganik dengan membebaskan pajak impor bahan baku, pemerintah memberikan perlindungan industri dengan menetapkan harga gas bumi untuk industri pupuk, pemerintah memberikan kelancaran logistik pendistribusian pupuk nasional, dan pemerintah memberikan subsidi pupuk. Contohnya, pada tahun 2011, total pagu anggaran sebesar 16,7 triliun rupiah dialokasikan untuk mensubsidi pupuk urea sebesar 7,25 triliun rupiah, pupuk non-urea sebesar 8,05 triliun rupiah dan pupuk organik sebesar 1,06 triliun rupiah. Kondisi ini menggambarkan bahwa perdagangan pupuk bukan merupakan pola pasar persaingan

sempurna namun sudah lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, SNI sebagai faktor penghambat arus impor belum memiliki kapasitas yang signifikan secara implementasi.

Reaksi positif yang dihasilkan dari penerapan SNI wajib produk kabel listrik adalah lebih cenderung disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: investasi industri kabel di Indonesia cukup banyak bahkan industri dalam negeri lebih banyak dari importir, berikutnya adalah sumber bahan baku kabel di Indonesia melimpah (tembaga dan aluminium). Produsen tembaga dan aluminium selama ini adalah PT.Smelting meskipun sebagian besar diimpor dari Cina. Investasi tersebut juga didorong oleh potensi pembangunan infrastruktur perkotaan baik yang baru maupun yang tertunda, ditambah dengan adanya pembangunan kota-kota baru di Indonesia, pembangunan properti seperti gedung perkantoran dan apartemen serta infrastruktur fisik lainnya (Kemenperin, 2010).

Reaksi positif yang dihasilkan dari penerapan SNI wajib produk regulator LPG berupa penurunan impor baik pada tahap awal (*temporary effect*) maupun secara berkelanjutan (*Continue Effect*) lebih disebabkan karena produk regulator LPG merupakan produk paket program konversi energi yang penjualannya dapat dilakukan pihak selain PT. Pertamina. Ini artinya pola perdagangan produk tersebut tidak menjadi hak monopoli PT. Pertamina. Produk lainnya yang sejenis adalah selang gas LPG yang diizinkan penjualannya secara bebas oleh industri. Penyebab lainnya adalah jumlah produsen dalam negeri yang lebih banyak dari industri importir. Jumlah produsen dalam negeri produk regulator LPG mencapai 15 industri, sedangkan importir sebanyak 9 importir. Ini merupakan dukungan yang kuat bagi pemberdayaan produk dalam negeri dari produk impor. Hal lain yang menjadi penyebab dampak positif ini adalah didukung oleh pasar regulator LPG yang cukup besar dan selalu meningkat hingga tahun 2014. Tingkat konsumsi nasional produk regulator LPG rata-rata mencapai 5 juta unit per tahun sedangkan tingkat produksi dalam negeri rata-rata mencapai 3,5 juta unit per tahun (BPS, 2014). Kondisi ini menunjukkan bahwa produsen dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan dalam negeri. Hal ini merupakan indikator bahwa potensi impor akan terjadi terhadap perdagangan produk regulator tabung LPG. Diketahui secara neraca, perdagangan tahun 2007-2012 trennya cenderung defisit. Hal ini disebabkan masuknya produk regulator LPG asal China tahun 2009 yang menguasai pasar dalam negeri hampir 50%. Seiring dengan pasar yang semakin jenuh, sebanyak 5 (lima) pabrik

regulator elpiji di Indonesia terpaksa berhenti beroperasi pada tahun 2012 karena kalah bersaing dengan produk asal China yang membanjir di pasar regulator nasional. Namun, di tahun 2013-2014 neraca perdagangan produk regulator LPG mengalami surplus. Hal ini mengartikan bahwa nilai impor mengalami penurunan sejak 2012 hingga 2014 tetapi terjadi penurunan daya saing industri karena ada 5 industri regulator LPG yang bangkrut.

Penerapan SNI wajib sakelar di tahun 2007 memberikan efek yang positif terhadap penurunan nilai impor dan peningkatan daya saing ekspor. Nampak dalam tabel produk sakelar memperoleh dampak yang konsisten positif (+). Hal ini disebabkan perdagangan produk sakelar terus berkembang dengan pasar Indonesia yang sangat besar. Jumlah penduduk Indonesia yang terus berkembang menunjukkan tumbuhnya keluarga baru. Keluarga baru tersebut membutuhkan tempat tinggal sehingga pembangunan perumahan pun berkembang dengan pesat. Meningkatkan kebutuhan seluruh prasarana perumahan tumbuh pesat termasuk produk sakelar. Diperkirakan hingga 10 tahun mendatang perdagangan produk sakelar akan terus tumbuh. Rangkuman dampak perdagangan impor dari sisi nilai impor tersaji dalam Tabel 4.

4.2 Dampak terhadap Unsur Perlindungan Konsumen

Menentukan dampak penerapan SNI wajib terhadap unsur perlindungan konsumen (K3L) menggunakan masyarakat (konsumen) pengguna produk yang akan diukur. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah objek yang terkena dampak penggunaan produk SNI wajib tersebut. Dampak tersebut dapat diukur secara kimia, fisika dan melalui persepsi umum yang dirasakan. Tetapi penelitian ini mengukur dampak yang dirasakan menggunakan metode uji petik dari sejumlah produk SNI wajib untuk diuji kesesuaiannya dengan SNI. Asumsinya, jika terdapat satu sampel produk yang diuji tidak sesuai maka disimpulkan bahwa dampak yang diinginkan dari penerapan SNI wajib tersebut tidak tercapai secara sempurna. Ukuran yang digunakan adalah persentase produk yang sesuai SNI. Penetapan produk lulus semua dinilai 100 persen aman, apabila kelulusan 85 persen maka produk "tidak aman 100 persen".

Dapat dipaparkan bahwa telah dilakukan uji petik pada 6 produk yaitu lampu swa-balast, ban kendaraan, pupuk, tusuk kontak, kotak kontak, tusuk kontak cabang, dan Sakelar. Hasil pengujian memperlihatkan terdapat 3 produk yang tidak lulus uji petik yaitu lampu swa-balast

(83,3 persen), ban kendaraan bermotor (75 persen), dan tusuk kontak cabang 3 (60 persen).

Berdasarkan hasil pengujian dari 22 sampel lampu swaballast yang diambil dari 11 kota di 9 propinsi dengan penyebaran Jakarta (2 unit sampel), Bogor (2 unit sampel), Bekasi (2 unit sampel), Tangerang (2 unit sampel), Bandung (2 unit sampel), Yogyakarta (2 unit sampel), Surabaya (2 unit sampel), Palangkaraya (2 unit sampel), Banjarmasin (2 unit sampel), Makassar (2 unit sampel), dan Mataram (2 unit sampel) diperoleh hasil seluruh sampel uji memenuhi 4 parameter pengujian yang dipersyaratkan terkait K3L yaitu uji kenaikan suhu kaki lampu (klausul 4.6), uji ketahanan terhadap panas (klausul 4.7), uji ketahanan terhadap api dan percikan api (klausul 4.8), dan Uji resistensi isolasi (klausul 5.4) tetapi tidak lulus uji perlindungan kejut listrik (klausul 5.3). Pada uji ini, sebanyak 13 sampel uji (41 %) dari 22 sampel yang diuji tidak lulus. Pengujian ini bertujuan agar produk lampu swa-balast mampu menahan kejutan listrik sebesar 500 volt dalam suhu lemari dengan kelembaban relatif 91-95 % pada suhu 20-30 °C selama 48 jam. Komponen yang harus mampu menahan adalah logam penghantar arus pada kaki-lampu dan bagian lampu yang disentuh. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa hanya 59% kondisi lampu swa-balast di pasaran yang aman dan sesuai SNI 6504:2001. Apabila persentase ini merupakan proporsi yang secara statistik mewakili kondisi nasional maka dapat disimpulkan bahwa 41 persen produk lampu swa-balast yang ada di pasaran dapat diasumsikan berpotensi "tidak aman" karena tidak sesuai dengan SNI. Dampak yang dapat terjadi yaitu kebakaran karena bahang (panas yang timbul). Ada beberapa kondisi penyebab kejut listrik di Indonesia yaitu arus yang naik turun, kelembaban udara yang tinggi, hubungan singkat, dan hubungan buruk. Hasil tersebut didukung sejumlah fakta yang terjadi pada tahun 2001-2012, ditemukan sejumlah produk lampu swa-balast tidak ber-SNI yang tersebar di 9 kota seperti Jakarta, Padang, Rembang, Batam, Surabaya, Palu, Bandung, Manado, dan Makassar. Lokasi penemuan terbanyak yaitu Suabaya dan Manado, dengan jumlah temuan 7 merk, 29.957 unit lampu tipe 2U/15 watt dan 238 unit jenis lainnya. Penemuan terbanyak terjadi pada tahun 2001, 2004 dan 2012. Keadaan ini menggambarkan bahwa pemerintah perlu memperkuat proses pengawasan di tingkat pasar. Bahkan, mulai dari pelabuhan masuk atau diperlukan skema sertifikasi yang lebih ketat untuk produk lampu swa-balast. Ada 3 kelemahan Indonesia terkait lampu swa-balast yaitu kondisi perdagangan ekspor-impor lampu swa-balast yang defisit (2010-2013), SNI

6504:2001 yang belum mencantumkan *national differences*, Indonesia merupakan "big market" bagi importir, dan diizinkan impor komponen untuk dirakit di Indonesia.

Berdasarkan hasil pengujian 13 sampel ban sepeda motor yang diambil di 13 kota dari 11 provinsi dengan penyebaran Jakarta (1 unit sampel), Bogor (1 unit sampel), Bekasi (1 unit sampel), Tangerang (1 unit sampel), Bandung (1 unit sampel), Yogyakarta (1 unit sampel), Semarang (1 unit sampel), Surabaya (1 unit sampel), Medan (1 unit sampel), Padang (1 unit sampel), Pontianak (1 unit sampel), Makassar (1 unit sampel), dan Mataram (1 unit sampel) diperoleh 1 parameter dari 4 parameter yang diujikan tidak mampu sesuai SNI, yaitu parameter *breaking energy (uji plunger)*. Hasilnya, dari 13 sampel ban sepeda motor yang diujikan, hanya 10 sampel yang lulus uji. Ini berarti terdapat 3 sampel (23 %) yang tidak memenuhi syarat SNI *plunger test*. Jika diasumsikan proporsi mewakili kondisi nasional, berarti ada 23 % produk ban sepeda motor di pasar yang tidak sesuai SNI sehingga berpotensi cukup besar menyebabkan resiko pecah ban saat digunakan.

Plunger test adalah pengujian yang dilakukan dengan menembus area tapak ban secara perlahan dengan sebuah pendorong yang memiliki akhir setengah bola. Tujuannya untuk memberikan jaminan ketangguhan ban sepeda motor dari tekanan parsial terhadap ban yang tidak normal seperti cekungan jalan, penusuk ban, dan batu. Sampel uji menunjukkan hasil *plunger test* memenuhi syarat hanya 77 % sedangkan parameter K3L lainnya seperti uji dimensi, uji ketahanan ban luar, dan uji ketahanan kecepatan semuanya lulus 100 %.

Hasil survei lapangan memperlihatkan terdapat sejumlah produk ban yang tidak sesuai dengan SNI. Pada tahun 2008 dan 2012, terdapat 7 merk ban dan 134 unit ban tidak sesuai SNI di daerah Solo, Jakarta, Makassar, Bali, Semarang dan Medan (diolah dari berbagai sumber). Berdasarkan penjelasan pakar ban dikatakan apabila 23 % produk yang tidak memenuhi SNI tidak segera ditindak dan ditarik dari peredaran maka berpotensi mengakibatkan pecahnya ban, dengan asumsi faktor lain tetap.

Rangkuman hasil analisis dampak penerapan SNI wajib pada sejumlah produk di Indonesia dalam Tabel 5. Nampak dalam Tabel 5, dari 7 sampel produk yang diberlakukan wajib, uji petik laboratorium, memperlihatkan 3 produk yang tidak memenuhi SNI 100 %.

Artinya penerapan SNI wajib memberikan dampak konsistensi terhadap SNI sebesar 57,14% dengan sampel produk sebanyak 7

produk. Hal ini tidak menggambarkan keakuratan data karenanya diperlukan pengulangan penelitian sehingga diketahui besar persentase yang presisi. Selain itu, dapat dilakukan penelitian dengan sampel yang lebih banyak. Berdasarkan prinsip penerapan SNI

wajib yang tidak memperkenankan 1 parameter yang tidak lulus uji, maka pengujian sampel ini memberikan gambaran awal terdapat kelemahan dalam penegakan dari penerapan SNI wajib di lapangan.

Tabel 4 Tinjauan dampak penerapan SNI wajib dari sisi nilai impor.

No	Nama Produk	Tahun Reg.	Temporary Effect	Continue Effecy	Rangkuman Dampak Impor (Temporary/Continue)
1	Lampu Swaballast (SNI 04-6504-2001)	2002	-	+	Tidak konsisten
2	Ban Kendaraan Bermotor	2012	-	+	Tidak konsisten
3	Tepung terigu(SNI 3751:2009)	2011	+	-	Tidak konsisten
4	Pupuk*)	2013	+	+	Konsisten +
5	Tabung Baja LPG (SNI 1452:2011) *	2012	-	-	Minus
6	Kabel listrik	2012	+	+	Konsisten +
7	Kipas angin (SNI 04-6292.1-2003)	2003	NA	-	Tidak konsisten
8	Baja lembaran (SNI 07-0601-2006)	2012	-	-	Minus
9	Regulator LPG (SNI 7369:2008)	2013	+	+	Konsisten +
10	Pelek Kendaraan Bermotor (SNI 4658:2008)	2012	-	+	Tidak konsisten
11	Tusuk Kontak – Kotak Kontak (SNI 04-3892.1-2006)	2007	+	NA	Tidak konsisten
12	Baja Tulangan Beton (SNI 07-0954-2005)	2012	+	-	Tidak konsisten
13	Saklar (SNI 04-6203.1-2006)	2007	+	+	Konsisten +
14	Kompor Gas LPG (SNI 7368:2007)	2012	-	-	Minus
15	Ubin Keramik (ISO 13006:2010)	2012	-	-	Minus
16	Keramik Berglasir (SNI 7275:2008)	2012	-	-	Minus
17	Kaca Lembaran (SNI 15-0047-2005)	2011	+	+	Konsisten +

sumber: Hasil pengolahan data peneliti (2014).

Tabel 5 Data dampak K3L dari produk SNI wajib.

No	Nama Produk	Tahun Regulasi	Tahun Uji Petik	Jumlah Parameter K3L Diujikan	Persen Memenuhi SNI	Parameter K3L Gagal
1	Lampu swaballast	2002	2012	6	5 (83,3%)	Uji perlindungan kejut listrik (klausul 5.3)
2	Ban kendaraan bermotor	2012	2009, 2011, 2012	4	3 (75%)	Uji <i>breaking energy</i> (<i>plunger test</i>)
3	Pupuk	2013	2010; 2011	Urea (3) TSP (8)	3 (100%) 8 (100%)	Tidak ada
4	Tusuk kontak	2007	2011;2012			Tidak ada
5	Kotak kontak	2007	2011;2012	5	5 (100%)	Tidak ada
6	Tusuk kontak cabang 3	2007	2011;2012	5	3 (60%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fungsi pembumian (klausul 11 IEC 60884-1) ▪ Uji tahan panas (klausul 25)
7	Sakelar	2007	2010	2	0 (0%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Resistans terhadap panas tidak normal dan terhadap api ▪ Uji kawat pijar

sumber: Data dari Pusat Sistem Penerapan Standar – BSN yang diolah kembali (2014).

4.3 Dampak terhadap Pelaku Usaha

Analisis dampak terhadap pelaku usaha dilakukan karena pelaku usaha adalah subjek yang terkena efek langsung dari kebijakan regulasi tersebut, meliputi industri lampu swabalast (n = 5), industri ban kendaraan bermotor (n = 8), industri tepung terigu (n = 4), industri pupuk organik (n = 4), industri tabung baja LPG (n = 4), industri kabel listrik (n = 5), industri kipas

angin (n = 10), industri baja lembaran (n = 3), industri regulator LPG (n = 5), industri pelek kendaraan bermotor roda 4 (n = 4), industri tusuk kontak-kotak kontak (n = 3), industri baja tulangan beton (n = 3), industri sakelar (n = 1), industri kompor LPG (n = 5), industri ubin keramik (n = 5), industri keramik berglasir (n = 5), dan industri kaca lembaran (n = 1).

Tabel 6 Data persepsi pelaku usaha mengenai implikasi penerapan SNI wajib untuk 17 produk terpilih.

No	Nama Produk	Jumlah Industri (n)	Volume Penjualan	Jumlah Pengaduan	Biaya Produksi
1	Lampu swaballast (SNI 04-6504-2001)	5	Meningkat	menurun	meningkat
2	Ban kendaraan bermotor	8	Meningkat	menurun	Meningkat
3	Tepung terigu (SNI 3751:2009)	4	Meningkat	Tetap	meningkat
4	Pupuk anorganik (4 jenis)	11	Meningkat	Tetap	Meningkat
5	Tabung baja LPG (SNI 1452:2011) *	4/5	Meningkat	menurun	Meningkat
6	Kabel listrik	5	Tetap	Menurun	Tetap
7	Kipas angin (SNI 04-6292.1-2003)	10	Meningkat	Menurun	Meningkat
8	Baja lembaran (SNI 07-0601-2006)	3	Meningkat	Tetap	Meningkat
9	Regulator LPG (SNI 7369:2008)	5	Meningkat	Menurun	Meningkat
10	Pelek kendaraan bermotor (SNI 4658:2008)	4	Meningkat	Menurun	Meningkat
11	Tusuk kontak-kotak kontak (SNI 04-3892.1-2006)	3	Tetap	Tetap	Meningkat
12	Baja tulangan beton (SNI 07-0954-2005)	3	Naik/turun*	Menurun	Naik/Turun*
13	Sakelar (SNI 04-6203.1-2006)	1	Meningkat	Meurun	Meningkat
14	Kompor gas LPG (SNI 7368:2007)	5	Tetap	Tetap	tetap
15	Ubin keramik (ISO 13006:2010)	5	Meningkat	Tetap	Tetap
16	Keramik berglasir (SNI 7275:2008)	5	Meningkat	Tetap	tetap
17	Kaca lembaran (SNI 15-0047-2005)	1	Meningkat	Tetap	meningkat
Kesimpulan		82	Meningkat (76%)	Menurun (53%)	Meningkat (71%)

sumber: Hasil pengolahan data peneliti (2014).

Keterangan:

- SNI ban kendaraan bermotor yaitu: SNI 06-6700-2002 Ban dalam, SNI 06-0098-2002 Ban mobil penumpang, SNI 06-0101-2002 Ban sepeda motor, SNI 06-0099-2002 Ban truk dan bus, dan SNI 06-0100-2002 Ban truk ringan.
- SNI pupuk anorganik yaitu: SNI 02-2803-2000 Pupuk NPK padat, SNI 02-3769-2005 Pupuk super fosfat, SNI 02-0086-2005 Pupuk tripel super fosfat (TSP), dan SNI 02-2805-2005 Pupuk kalium klorida (KCl).
- SNI kabellistrik yaitu SNI 04-6629.3-2006, SNI 04-6629.4-2006, dan SNI 04-6629.5-2006, atau kabel daya dengan insulasi

terekstrusi (SNI IEC 60502-1:2009 dan SNI IEC 60502-2:2009).

- * Kasus khusus.

Hasilnya, volume penjualan secara umum memperlihatkan peningkatan (76 % responden). Ini terjadi pada sejumlah besar industri yang tampak dalam table, kecuali industri kabel listrik, industri tusuk kontak-kotak kontak, dan kompor gas LPG. Peningkatan volume penjualan lebih disebabkan oleh pangsa pasar dalam negeri yang luas dan faktor permintaan negara luar terhadap produk Indonesia (ekspor). Rangkuman hasil persepsi pelaku usaha mengenai implikasi penerapan SNI wajib tersaji dalam Tabel 6.

Jumlah pengaduan, secara umum menunjukkan kecenderungan menurun. Terdapat 53 % responden yang menyatakan pengaduan mutu produk mengalami penurunan. Penurunan jumlah pengaduan ini disebabkan semakin baiknya mutu produk yang dihasilkan dengan sertifikasi SNI. Biaya produksi, secara umum memperlihatkan kecenderungan meningkat. Ada 71 % responden yang menyatakan bahwa pemberlakuan SNI wajib cenderung meningkatkan biaya produksi kecuali industri kabel listrik, kompor gas LPG, ubin keramik, dan keramik berglasir yang cenderung mengalami stagnasi biaya produksi. Peningkatan biaya produksi disebabkan adanya biaya sertifikasi yang meliputi biaya pengujian dan biaya uji sampel. Oleh karena itu, bagi Industri dengan komponen pengujian yang banyak akan semakin besar biaya operasional yang dibutuhkannya.

5. KESIMPULAN

Penerapan SNI Wajib terhadap perdagangan secara umum memberikan dampak negatif (-) pada tahun awal pemberlakuan (memberikan efek kejutan) secara beruntun dari awal pemberlakuan hingga beberapa tahun. Jika dikuantifikasi mendekati 50% berdampak negatif (-) dan sebagian memberikan dampak positif (+). Apabila ditinjau dari nilai impor, penerapan SNI wajib cenderung berdampak negatif (-) dengan meningkatnya produk impor dalam negeri tetapi dalam perkembangannya hingga tahun 2014 laju impor berhasil ditekan dengan perbandingan dampak negatif (-) dan positif (+), 50:50.

Pada sisi daya saing produk secara keseluruhan menunjukkan penerapan SNI wajib memberikan dampak negatif (-) terhadap daya saing. Ini memberikan makna bahwa penerapan SNI berdampak pada kesetaraan produk dan keberterimaan produk di pasar kompetitif dari segi kualitas dan harga. Namun demikian, ada faktor lain yang berpengaruh yaitu sejumlah kebijakan pemerintah terkait produk seperti kebijakan pajak perdagangan, insentif industri, pengawasan rantai pasokan dan sebagainya.

Dampak penerapan SNI Wajib terhadap unsur perlindungan konsumen (K3L) secara umum ($n = 7$) negatif dengan rincian hanya 3 produk yang lulus uji petik dari 7 produk yang dianalisis (43 %), artinya sebagian besar (57 %) produk yang diuji petik merupakan produk dengan potensi resiko berbahaya terhadap K3L. Produk beresiko tersebut yaitu lampu swa-balast, ban kendaraan bermotor, tusuk kontak cabang 3, dan sakelar. Ini menunjukkan bahwa penerapan SNI berdampak pada prasyarat

keberterimaan produk secara pengakuan dan peningkatan kualitas.

Dampak penerapan SNI Wajib terhadap pelaku usaha secara umum meningkatkan volume penjualan (76 % responden) dan menurunkan jumlah pengaduan produk gagal (53 % reesponden). Disamping itu, penerapan SNI wajib memberikan efek peningkatan biaya operasional pelaku usaha (71 % responden). Hasil ini berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 80 industri penghasil produk ber-SNI wajib. Ini menunjukkan bahwa penerapan SNI wajib. berkendala pada kebijakan pemerintah untuk mendapatkan formulasi biaya yang dapat mendorong pelaku usaha untuk dapat menerapkan SNI wajib dan terus berkembang.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat direkomendasikan bahwa diperlukan adanya pengkajian atau penelitian terkait dengan pemberlakuan SNI wajib yang mencantumkan unsur kepentingan nasional (*National Differences*), diperlukannya pengawasan terhadap hasil surveilen LPK pada produsen untuk dilaporkan menjadi bahan evaluasi bagi KAN (Komite Akreditasi Nasional), diperlukan pengaturan oleh Pemerintah mengenai industri yang melakukan perakitan produk ber-SNI Wajib dengan bahan baku 90% impor karena berpotensi menumbuhkan industri perakitan produk ber-SNI wajib yang tidak terkena aturan, diperlukan pembahasan mengenai kaji ulang validasi SNI wajib yang ditekankan pada substansi persyaratan mutu dan substansi persyaratan K3L, diperlukan adanya pedoman (standar) yang mengatur rincian item-item biaya yang dikeluarkan untuk proses sertifikasi produk dengan harga patokan dan fluktuatif agar biaya sertifikasi tidak menjadi faktor beban bagi pelaku usaha yang signifikan, diperlukan adanya kebijakan regulasi teknis yang beriringan dengan kebijakan penyediaan dana yang besar untuk mekanisme pengawasannya, diperlukan adanya pengendalian produk tidak berkualitas (tidak berstandar) yang harus dimasukkan dalam Undang-Undang Standar dan Penilaian Kesesuaian, dan diperlukan adanya pembatasan oleh Pemerintah melalui regulasi mengenai izin usaha perakitan dengan sebagian besar bahan baku impor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Standardisasi Nasional yang telah mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan kegiatan penelitian ini. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ir.

Gembong Sukendra, Akhmad, Azriadi dan Ir. Bartien Sayogo atas ilmu dan waktu yang diberikan selama proses penulisan artikel ini, dan terima kasih yang tiada terhingga kepada Dr. Ladiyani Retno, M.Sc atas waktu dan kesediaannya memberikan koreksi, saran dan masukan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga artikel ini dapat tersusun dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Baller, S. (2007). *Trade Effects of Regional Standards Liberalization*. Washington: World Bank.
- BSN. (2003). *Pedoman Standardisasi Nasional PSN 301-2003 Pedoman Pemberlakuan SNI secara Wajib*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Chen, M. X. & Mattoo, A. (2008). *Regionalism in Standards: Good or Bad for Trade*. Washington: World Bank.
- Chen, M. X., Otsuki, T. & Wilson, J. S. (2006). *Do Standards Matter for Export Success?* Washington: World Bank.
- Christensen, J. D. & Goedhuys, M. (2004). *Impact of National policy and Legal Environments on Employment Growth and Investment in Micro and Small Enterprise*. Geneva: International Labour Office.
- Gerundino, D. & Hilb, M. (2010). *ISO Focus: The ISO Methodology Assessing the Economic Benefits of Standard* (pp. 10-16). Geneva: ISO Central Secretariat.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2007) *Peraturan Menteri Perdagangan No.14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.40/M-IND/PER/4/2009 tentang Perubahan atas peraturan menteri perindustrian nomor 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua secara wajib*. Jakarta: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
- . (2010). *Laporan Studi 2010: Kedalaman Struktur Industri yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global*. Jakarta: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
- PPMB. (2014). *Data Permintaan NRP dan NPB Industri Tahun 2011-2013*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- PSPS. (2014). *Data Hasil Uji Petik Integritas SNI untuk 6 Produk Pusat Sistem Penerapan Standar*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Purwanto, E. H. (2015). *Signifikansi Helm SNI sebagai Alat Pelindung Pengendara Sepeda Motor dari Cedera Kepala*. *Jurnal Standardisasi*, 17, 1, 31-46.
- Ratnawati. (2004). *Penerapan Peta Kendali X , R Dan Sampel Penerimaan Standar Militer 414 pada Proses Grading untuk Pengendalian Mutu Udang Beku (Studi Kasus di PT SKB-Sidoarjo)*. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 5, 2, 55-63.
- Setiadi, B. (2011). *Kepala BSN: Standar adalah Instrumen yang Diinginkan dalam Suatu Negara*. Diakses 15 Agustus 2011 dari http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/3199/Kepala-BSN---Standar-adalah-instrumen-yang-diinginkan-dalam-suatu-negara#.V-4LmdycHIU.
- Sanchez, G., Alzua, M. L., & Butler, I (2008). *Impact of Technical Barriers to Trade on Argentine Export and Labor Markets*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.